

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), merupakan rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya selama 1 (satu) tahun.

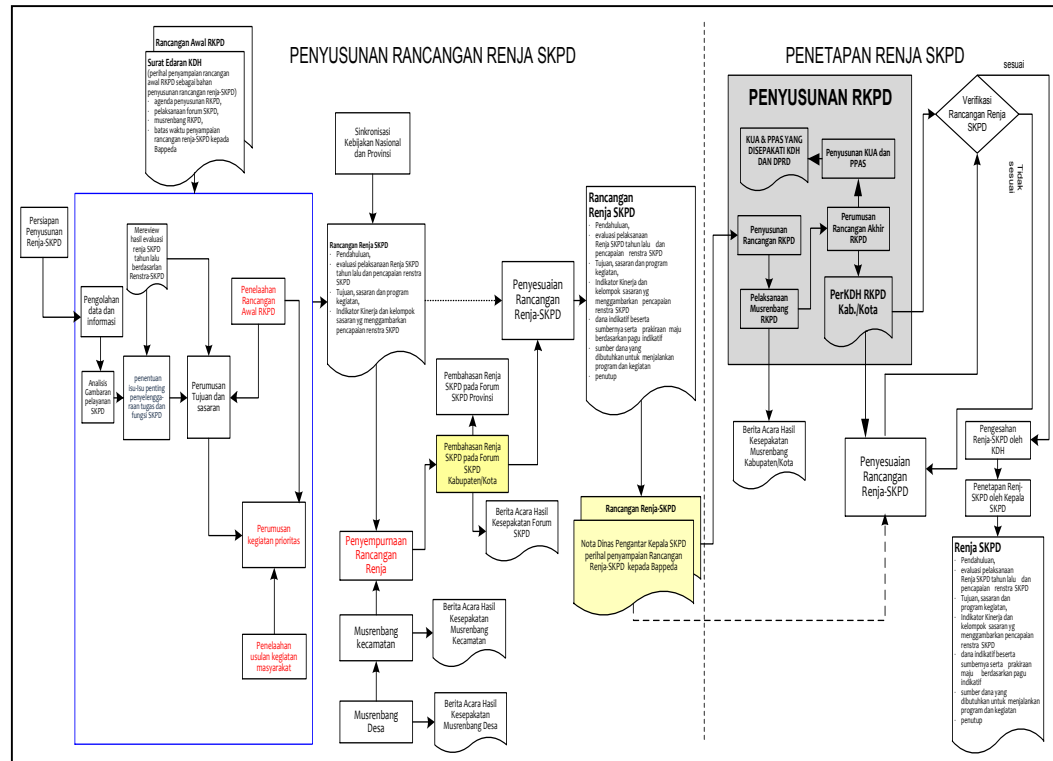
Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang terjabarkan dalam program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang mempedomani arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam perubahan KUA dan PPAS dan perubahan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
3. Renja-PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2018, dengan mempertimbangkan sejauh mana capaian kinerja yang telah tercapai pada semester 1 Tahun 2018 serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendesak dan

krusial yang harus dipenuhi pada perubahan APBD Tahun 2018.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD



Sumber gambar : Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Mengingat arti strategis dokumen Renja-PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja-PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 6). Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tercantum dalam regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pematang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 41). Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa yang melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun fungsi yang diselenggarakan BPKAD dalam melaksanakan tugas tersebut adalah :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam hal penyampaian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi **“Terwujudnya Pematang Hebat yang Berdaulat, Berjatiidiri, Mandiri dan Sejahtera”** yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Tahun 2018 sesuai Peraturan Bupati Pematang Nomor 25 Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengelola Sumber-Sumber Pendapatan.
4. Rapat Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41);
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 25);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018

- a) Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2018,
- b) Mewujudkan Sinergitas Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2018

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam menyusun perubahan rencana program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang;
- b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan seluruh Bidang pelaksana teknis Program dan Kegiatan;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja;
- d. Menjadi acuan bagi seluruh bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang karena memuat arah dan kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Perubahan Tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra BPKAD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

Meguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG SAMPAI DENGAN JUNI 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPKAD sampai dengan Juni Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang menetapkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 dengan mengacu program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran - Penetapan Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 19 kegiatan;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 12 kegiatan;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 6 kegiatan;
5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang terdiri dari 1 kegiatan;

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 26 kegiatan.

Indikator Hasil Program Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 untuk mendukung Sasaran Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

I. Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan, melalui Program Pelayanan administrasi Perkantoran dengan melaksanakan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 7.000 surat/nota dinas;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik targetnya 4 jenis kebutuhan;
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan target 205 unit;
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional dengan target perijinan untuk 25 motor dan 7 mobil ;
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan target 440 buku dan 10 SK;
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang dianggarkan untuk 12 bulan;
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan target 10 unit;
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 1 Paket, 30 Toner;
9. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan targetnya 3 Paket;
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 12 bulan;

11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 5 unit;
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 1 paket;
13. Penyediaan Makanan & Minuman dengan target 12 bulan;
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan target 12 kali;
15. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah dengan target 12 Laporan
16. Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan dengan target 72 Laporan;
17. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan dengan target 5.000 SP2D;
18. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Dana dan Anggaran Kas dengan target 180 SPD;
19. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji dengan target 500 SKPP.

II. Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan, melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan target 55 unit;
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 3 unit;
3. Pengadaan Meubeleur dengan target 1 paket;

4. Pengadaan Komputer dan perlengkapannya dengan target 21 unit;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan target 2 lokal Gedung Kantor BPKAD selama 12 bulan;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dengan target 1 unit, 12 bulan;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan Target 25 motor, 7 mobil, 12 bulan;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 10 Jenis;
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target 1 unit.
10. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleu dengan target 12 bulan;
11. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya dengan target 50 unit;
12. Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi dengan target 1 sistem dan 1 jaringan.

III. Indikator hasil program prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN melalui program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan target 10 Kali.

IV. Indikator hasil program jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia melalui program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 15 Buku;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan target 20 Buku;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 20 Buku.
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasi dengan target 100 buku
5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi dengan target 25 buku.
6. Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan target 12 laporan.

V. Indikator hasil program prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia melalui program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD dengan kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan target 100 buku.

VI. Indikator hasil program opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Satuan Harga dengan target 225 Buku;
2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan target 90 Buku;
3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, target 200 Buku;

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, target 2 paket;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD, target 2 paket;
6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, target 2 paket;
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, target 2 paket;
8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, target 640 Buku;
9. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, target 14 Buku;
10. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Target 120 orang;
11. Sertifikasi tanah milik pemerintah Kabupaten Pemalang dengan target 46 sertifikat;
12. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS dengan target 12.400 dokumen;
13. Pembayaran PBB aset daerah/BMD dengan target 150 SPT;
14. Pendistribusian Barang Milik Daerah dengan target 3 kali kegiatan;
15. Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKBU dan RKPBU dengan target 100 buku;
16. Penyusunan Laporan Semesteran BMD, target 2 laporan;
17. Penyelesaian pemindahtanganan dan penghapusan BMD dengan target 2 laporan;

18. Penyusunan Laporan Realisasi penerimaan BPKAD dengan target 12 laporan;
19. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan target 1 dokumen;
20. Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dengan target 100 Laporan;
21. Pengelolaan Kerugian Daerah dengan target 4 Laporan;
22. Sosialisasi/peningkatan SDM/pengurus barang/SIMDA BMD dengan target 100 orang;
23. Pemantauan, pemanfaatan aset/BMD dengan target 12 laporan;
24. Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi) dengan target 1 laporan;
25. Pengelolaan Kas Daerah dengan target 12 Laporan;
26. Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS dengan target 2 Laporan.

Pencapaian realisasi kegiatan pada akhir semester 1 Tahun 2018 di BPKAD sebesar 47,28%. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan pengadaan kendaraan dinas yang telah diproses dokumen pengadaannya tetapi belum diproses kelengkapan pertanggungjawabannya sebesar Rp.6.436.420.000,00 yaitu pengadaan 25 unit avansa untuk pejabat eselon 3.

Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 dapat diuraikan sebagaimana Tabel 2.1. berikut :

